

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal., M. S. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Al-Ghifari, A. (2008), *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Lindblom, Charles E (1986), *Proses Penetapan Kebijaksanaan*, Jakarta, Penerbit Erlangga Cetakan Ke-2.
- Lubis, N. L., (2013), *Psikologi Kespro; Wanita dan Perkembangan Reproduksi*. Jakarta: Kencana Prenada Medika.
- Maryanti, D. dan Majestika, S (2009), *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Moleong, j. Lexy, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, (2013), *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group.
- Said Zainal Abidin. (2002), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Pancur Siwah.
- Sibagariang, E. (2010), *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Trans Info Media. Subarsono, (2011), *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*, Yogyakarta, UNY Press.
- Wirjono Prodjodikoro dalam PNH Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Winarno, Budi, (2002), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress
- _____,(2008), *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Wibawa, Samodra dkk, (2018), *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- William N. Dunn. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- Akil, M., & Maryati, M. (2022). *Implementasi UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah di Tinjau dari Hukum Islam Al-Tafaqquh*: Journal of Islamic Law, 3(1), 35-42.
- Badruzaman, D. (2019). *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah*. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 2(2), 1-20.
- Chairiyah, R., & Anggraeni, L. (2022). *Hubungan pengetahuan remaja tentang dampak media sosial, pergaulan bebas dan status ekonomi terhadap kejadian pernikahan usia dini kelurahan pasir jaya kecamatan bogor barat kota bogor tahun 2021*. Jurnal Education And Development, 10(2), 172-175.
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(1), 16-26.
- Hasyim, P. (2023). *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*. Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2), 36-40.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). *Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 34-61
- Karlina, R. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Desa Negeri Ratu Ngambur Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat*.
- Mansari, Muzakir, Oslami, A. F., & Fatahilah, Z. (2020). *Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim*
- Ramdhani, H. (2022). *Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta).
- Sunaryo, Dian Rosa, Ria Arifianti, dan Departemen Administrasi Bisnis, (2022). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung*. 4:205-13.
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K (2022). *Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*. AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, 28-33.

Yumarni, A. (2019). *Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan kua wilayah kota Bogor)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1 ayat (3)

Internet

<https://www.liputan6.com/amp/3109869/penyebab-perkawinan-anak-marak-terjadi-di-perkotaan> rilis tahun 2017 diakses tanggal 25 Nov 2023n

<https://www.radarbogor.id/2023/01/16/dispensasi-kawin-di-kota-bogor-meningkat-didominasi-hamil-di-luar-nikah/> rilis tahun 2023 dikases tanggal 25 November 2023

https://babelprov.go.id/artikel_detil/penanggulangan-stunting-melalui-pendekatan-lintas-sektor/, diakses tanggal 25 November 2023

<https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-dengan-tingkat-pernikahan-anak-usia-dini-terbanyak-B6D6m>, diakses pada tanggal 5 juli 2024

<https://allrelease.id/2023/01/27/kemen-ppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-menghawatirkan/>, diakses pada tanggal 25 November 2023

<https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 November 2023

<https://www.batukarinfo.com/referensi/pencegahan-perkawinan-anak-pencepatan-yang-tidak-bisa-ditunda>, diakses pada tanggal 26 November 2023

<https://batukarinfo.com/system/files/PUSKAPA-Child-Marriage-Report-Final->, diakses pada tanggal 26 November 2023